

BAB II

KERANGKA TEORITIK

2.1 Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Massa

2.1.1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah proses komunikasi melalui media massa untuk menyampaikan informasi pada massa. Bitner dalam Rahmat (1996:188) menjelaskan : *mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people* (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang).

Tokoh komunikasi lain, Garbner dalam Rahmat (1996:188) memaparkan bahwa “*mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies*” (komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri).

Definisi komunikasi massa oleh Baran dalam bukunya *Introduction to Mass Communication* adalah *the process of creating shared meaning between the mass media and their audience* (Baran, 2010:6). Baran juga memaparkan karakteristik komunikasi massa adalah pesan yang bisa diidentifikasi, melalui teknik produksi dan tidak fleksibel. Dari sisi komunikator, komunikator dalam komunikasi

massa jumlahnya banyak dan terdapat pada struktur organisasi. Komunikasi bersifat banyak dan heterogen. Umpan baliknya terlambat dan inferensial (Baran, 2010:7)

Berangkat dari berbagai definisi tersebut, maka komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang berada dalam organisasi dengan diarahkan pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim sehingga pesan yang bersifat umum dapat sampai secara serempak dan sementara.

Karakteristik komunikasi massa menurut Alo Liliweri (2010: 202-203) dalam bukunya Strategi Komunikasi Masyarakat adalah :

- a. Komunikator bergerak organisasi-terstruktur-bersistem, perusahaan bisnis, industri media.
- b. Pesan bersifat umum dan tidak rahasia (setelah dipindahkan dari ruang private, personal, kelompok ke ruang publik / massa)
- c. Media dalam komunikasi massa dalam wujud cetak, elektronik (visual, audio, audio visual) yang melibatkan cara kerja industri karena melipatgandakan pesan melalui percetakan dan frekuensi atau gelombang udara.
- d. Komunikasi bersifat komunitas, publik, umum yang anonim, artinya diantara mereka tidak saling kenal, tersebar dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda.
- e. Efek bermakna adanya perubahan pada persepsi atau sikap komunikasi setelah menerima pesan dari komunikator.

- f. Gangguan dari komunikasi massa adalah hambatan perpindahan pesan yang bersumber dari :
- Komunikator : kredibilitas (pendidikan, pengetahuan, pengalaman, hak wewenang, status) cacat fisik dan mental
 - Pesan : (bahasa, istilah dialek, aksen, kultur) yang mengubah makna pesan.
 - Komunikan : pendidikan, pengalaman, pengetahuan
 - Dampak : laten, manifest
 - Konteks : ruang, waktu, sosiologi, antropologi, psikologi, dsb.

2.1.2. Media Massa

Salah satu unsur komunikasi massa adalah media tempat berlangsungnya proses komunikasi. Media massa adalah sarana untuk mentransfer dan menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses secara luas. Menurut Tambukara (2012:13), media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat satu dengan lainnya melalui produk media massa yang dihasilkan. Fungsi dari institusi media yaitu sebagai saluran produksi dan distribusi konten simbolis, sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada, keikutsertaan baik sebagai pengirim atau penerima sukarela, menggunakan standar profesional dan birokrasi, dan media sebagai perpaduan antara kebebasan dan kekuasaan.

Wahyudi (1991:50) berpendapat bahwa pesan dalam media massa mempunyai karakter yaitu disampaikan dengan lebih

mengutamakan peristiwa dan pendapat yang penting, menarik dan aktual. Secara lebih rinci, Wahyudi memaparkan sifat media massa adalah pesan yang umum, mempunyai sasaran, komunikasi bersifat satu arah, tercetak, periodik, beroperasi dalam organisasi dan karya banyak orang.

2.2. Tinjauan Tentang Teori Pers

2.2.1. Pengertian Pers

Kata pers berasal dari bahasa Inggris *press*. Istilah pers dalam pengertian luas, mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan / menyebarkan informasi, berita. Pers dalam pengertian sempit, hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melalui proses percetakan seperti majalah, surat kabar. (Rachmadi, 1990 : 9-10)

Pada proses komunikasi, pers adalah perantara atau saluran bagi pernyataan-pernyataan yang oleh penyampaiannya ditunjukkan pada penerima. Pers sebagai saluran bagi pernyataan umum yang berasal dari individu-individu dalam surat kabar, radio, majalah, televisi, dan sebagainya. (Rachmadi, 1990 : 10-11)

2.2.2. Teori Pers

1. Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*)

Teori ini lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa bentuk pemerintahan otoriter. Pada teori ini, media massa berfungsi menunjang negara dan pemerintah dengan

kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Pemerintah mengawasi secara langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Kebebasan pers sangat tergantung pada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak. (Rachmadi, 1990 : 31)

Manusia dalam teori pers otoriter merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat terstruktur dalam organisasi-organisasi yang bertujuan akhir pada negara. Negara adalah pusat segala kegiatan (Rachmadi, 1990: 31-32).

Sistem pers otoriter berpandangan bahwa kedudukan negara lebih tinggi daripada individu dalam kehidupan sosial (Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005 : 19). Teori ini dipakai oleh Benito Mussolini yang berpendapat bahwa anggota masyarakat tidak dapat memerintah negara. Tokoh lainnya yang menganut paham ini adalah Adolf Hitler yang berpendapat kebenaran adalah yang menguntungkan kepentingan dan solidaritas negara Jerman (Rachmadi, 1991 : 33).

2. Teori Pers Liberal (*Libertarian*)

Teori ini berkembang pada abad ke tujuh belas dan ke delapan belas. Teori pers liberal berpandangan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi bila diberikan kebebasan menyatakan pendapat. Kebenaran dan pengetahuan diperoleh manusia dengan usahanya sendiri. Pers harus mempunyai

kebebasan yang seluas-luasnya tanpa harus dikekang oleh pihak berkuasa. Kebebasan pers dalam teori Liberal adalah bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari kebenaran. (Rachmadi, 1990 : 34-35).

Pers pada teori ini banyak memberi landasan kebebasan dalam informasi dan hiburan tetapi sedikit kebajikan yang tersiar dan sedikit kontrol pada pemerintah. Aturan atau batasan penyiaran tidak diterapkan kecuali pengaturan untuk peningkatan materi pemilik media (Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005 : 20).

3. Teori Pers Komunis (*Marxist*)

Teori komunis berkembang pada awal abad kedua puluh. Media massa dalam teori komunis merupakan alat pemerintahan (partai) dan bagian integral dari negara. Media harus tunduk pada pemerintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai. Pers harus melayani kelas dominan dalam masyarakat (*proletar*). Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan “indoktrinasi massa” atau bimbingan massa yang dilakukan oleh partai. Stalin menyatakan bahwa pers merupakan satu-satunya alat untuk membantu partai berbicara dengan kelas pekerja setiap hari. Kebebasan pers dibatasi untuk menerbitkan berita atau pandangan sendiri. Kebebasan pers dari bunyi pasal 125 konstitusi Stalin 1963 menyatakan bahwa kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat benar-benar

dijamin konstitusi, dengan pengertian bahwa kebebasan disini dihubungkan dengan pemilikan modal materi untuk penerbitan dan percetakan di tangan rakyat. Akan tetapi dalam prakteknya kemudian, banyak hal yang dialami pers komunis yang menyebabkan pers liberal tidak bebas untuk menikmati hak-haknya sesuai dengan konstitusi (Rachmadi, 1990:35-37)

4. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Teori ini muncul pada abad ke dua puluh sebagai protes kebebasan yang mutlak dari teori libertarian. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab pada masyarakat.

Theodore Peterson menyatakan bahwa kebebasan pers harus disertai kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massa. Berdasar teori yang diungkapkan Peterson, kebebasan pers masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban, kebebasan pers harus disertai kewajiban bertanggung jawab.

Teori tanggung jawab sosial berorientasi pada kepentingan umum. Tugas pers harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melihat dan menilai tugas pers (Rachmadi, 1990:37-40).

5. Teori Pers Pembangunan

Pers pembangunan lahir pada tahun 1950 dari gagasan UNESCO. Pers pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai *development journalism* menunjuk pada proses komunikasi melalui media massa, baik media masa cetak maupun elektronik dan media lainnya. Pers pembangunan berperan dan berfungsi ikut serta secara aktif dalam upaya pembangunan bangsa (Rachmadi, 1990:86).

Prinsip prinsip pers pembangunan menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005: 25-26) adalah:

- a. Menerima dan melaksanakan tugas pembangunan yang positif sesuai kebijakan pemerintah.
- b. Independensi pers terbuka bagi pembatasan sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
- c. Pers harus memberi prioritas dalam isi dan budaya dan bahasa nasional.
- d. Pers harus memberi prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkan informasi negara dengan negara berkembang lainnya.
- e. Wartawan mempunyai tugas dan tanggung jawab maupun kebebasan dalam tugas menghimpun dan menyebarkan informasi.

f. Negara memiliki hak ikut campur dalam atau membatasi operasi-operasi media pers, serta penyelenggaraan sensor, pemberian subsidi dan kontrol langsung dapat dibenarkan.

6. Teori Partisipasi Demokratik

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005: 26-27) menjelaskan bahwa teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Teori partisipasi demokratik muncul sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta. Teori ini juga muncul untuk melawan sentralisme dan birokratisasi institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial.

Teori partisipasi demokratik melihat media massa terlalu dekat dengan kekuasaan, terlalu responsif terhadap tekanan politis dan ekonomis, terlalu monopolistik dan diprofesionalkan. Mencerminkan kekecewaan terhadap parpol yang mapan dan terhadap sistem demokrasi. Inti dari teori ini terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori partisipasi demokratik menyukai keseragaman, skala kecil, lokalitas dalam institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.

2.3. Opini Publik

2.3.1. Pengertian

Opini publik berasal dari dua kata yaitu opini dan publik. Kata opini berasal dari kata *opinion* yang berarti pendapat. Kata publik

dalam bahasa Inggris *public* yang artinya umum. Opini publik dapat diartikan sebagai pendapat umum.

Publik adalah kelompok yang abstrak dari orang-orang yang menaruh minat terhadap suatu persoalan yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu proses pertukaran pikiran melalui komunikasi (Tambukara, 2012 : 100)

Opini dipahami sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam suatu situasi tertentu. Walaupun validitasnya lebih tipis dari pengetahuan positif, namun opini lebih kuat dugaan dari sekedar kesan. Dalam hal ini publik tidak sama dengan massa atau *crowd* (kerumunan). Bahkan publik merupakan bagian dari massa yang memiliki perhatian dan aktif dalam proses memecahkan masalah. Publik juga diartikan sebagai individu-individu di dalam kelompok yang memiliki opini atau pendapat (Tambukara, 2012 : 100-101).

Opini publik adalah pendapat yang sama yang dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui komunikasi sebagai jawaban atas pertanyaan. Opini publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan media.

2.3.2. Unsur-unsur Opini Publik

Unsur-unsur opini publik menurut Arifin dalam Tambukara (2012:103) adalah :

1. Harus ada isu peristiwa atau kata-kata, penting dan menyangkut kepentingan umum yang disiarkan oleh media massa.

2. Harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut dan menghasilkan kata sepakat, mengenai sikap dan pendapat mereka.
3. Pendapat mereka harus diekspresikan atau dinyatakan dalam sikap, lisan dan tertulis (Tambukara, 2012 : 103).

2.3.3. Bentuk-bentuk Opini Publik

1. Opini Publik Laten (*Latent Public Opinion*)

Opini publik laten adalah pendapat umum yang tersembunyi, namun sangat potensial karena dalam massa tertentu dapat menjadi riil dan aktual.

2. Opini Publik Aktual (*Actual Public Opinion*)

Opini publik actual adalah pendapat umum yang nyata karena dinyatakan secara terbuka dan ditanggapi secara intensif dan bahkan berpengaruh secara luas.

2.4. Tinjauan Tentang Hubungan Pers dan Masyarakat

2.4.1. Peranan Pers

Pers mempunyai peranan penting sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Pers dapat berperan dalam penyampaian kebijakan dan program pembangunan pada masyarakat. Pers berperan sebagai penghubung yang kreatif antara masyarakat dan pemerintah (Rachmadi, 1990:17).

Peranan pers lainnya adalah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat dan dalam menegakkan disiplin nasional. Pers berperan pula sebagai “agen perubahan” atau

agent of change. Sebagai *agent of change*, pers membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Tugas pers sebagai agen perubahan untuk menunjang perubahan sosial dan pembangunan ialah :

- a. Memperluas cakrawala pandangan
- b. Memusatkan perhatian khalayak
- c. Menumbuhkan aspirasi
- d. Menciptakan suasana membangun (Rachmadi, 1990:17-18)

2.4.2. Fungsi Pers

Fungsi pers menurut Rachmadi, pada hakikatnya bersifat relatif dan bertalian dengan keperluan yang beraneka ragam di dalam masyarakat dan negara yang berbeda-beda. Pers tidak dapat lepas dari struktur masyarakat. Struktur sosial dan politik menentukan corak, kegiatan serta tujuan yang hendak dicapai oleh pers. (Rachmadi, 1991:18)

Sebagai media komunikasi, pers memberikan sumbangan yang cukup besar sebagai alat perubahan sosial. Menurut UU RI No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, fungsi pers sebagai kegiatan komunikasi massa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Rachmadi memaparkan beberapa fungsi pers yaitu :

- a. Mendidik

Pers berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena tidak sedikit bantuan yang disampaikan dalam menunjang pendidikan masyarakat.

b. Menghubungkan

Pers berfungsi menyelenggarakan hubungan sosial (*social contact*) antara warga negara satu dengan lainnya.

c. Penyalur dan pembentuk opini public

Pers menyebarkan pendapat orang-orang secara perlahan mampu membentuk pendapat umum.

d. Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah fungsi pers yang paling penting. Pers berfungsi sebagai pengawas lingkungan terutama pada pemerintahan (Rachmadi, 1990:20-21)

2.4.3. Pers sebagai lembaga masyarakat

Pers lahir untuk memenuhi keperluan masyarakat akan informasi secara terus menerus mengenai kejadian atau peristiwa besar atau kecil yang terjadi di masyarakat. Pers sebagai lembaga masyarakat dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga lainnya. Masyarakat merupakan landasan bagi pers untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi sosial yang penting di dalam masyarakat. Menurut Wonohito, cara kerja, muatan siaran, tujuan, kontrol sosial, dan segala aktivitas pers terkait pada falsafah yang dianut masyarakatnya (Rachmadi, 1990 : 12).

Masyarakat menggunakan media dengan berbagai alasan diantaranya, mencari informasi, mencari hiburan, mencari pendidikan, memperoleh informasi dan kontrol sosial (Rachmadi, 1990:12).

2.4.4. Interaksi Pers, Negara, dan Masyarakat

Sebagai lembaga masyarakat, pers berfungsi untuk mendukung kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Interaksi antara pers, negara dan masyarakat adalah adanya saling ketergantungan antara komponen komunikasi dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan negara dan masyarakat. Interaksi tersebut dapat terjalin suasana saling percaya, terbuka dan saling menunjang. Interaksi antara ketiga komponen tersebut mengharuskan pemerintah untuk terbuka atau transparansi dalam memberi informasi kebijakan pemerintah. Pers harus memberitakan kebijakan pemerintah pada masyarakat berdasar kode etik jurnalistik. Pada tataran masyarakat, masyarakat harus terbuka memberi informasi sesuai fakta baik pada pers atau pemerintah agar pemerintah bijak dalam mengambil keputusan yang pro rakyat (Rachmadi, 1991 : 203).

2.5. Tinjauan Tentang Materi Dakwah

2.5.1. Pengertian Dakwah

Syaikh ali Mahfudz mendefinisikan dakwah yaitu memotifasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan

kebaikan dan mencegah kemunkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Menurut M. Natsir, dakwah adalah usaha-usaha menyampaikan pada manusia tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan berbagai macam media yang diperbolehkan akhlaq untuk membimbing pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Amin, 2007:3).

Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat (Shihab, 1992 : 194).

Dari berbagai uraian tersebut, dakwah adalah usaha untuk mengajak orang lain menuju kebaikan di jalan Allah yang berdasar pada Al Qur'an, Sunnah dan sejarah Islam guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2.5.2. Dasar Hukum Dakwah

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. An-Nahl : 125) (Depag RI, 2005:282)

Pendapat mengenai hukum berdakwah ada dua. *Pertama*, dakwah dianggap *fardhu ain* yaitu wajib dilakukan oleh semua muslim yang *baligh*, kaya-miskin, pandai-bodoh semua wajib berdakwah. *Kedua*, *fardhu kifayah* yaitu dakwah disampaikan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban seluruh muslim.

2.5.3. Materi Dakwah

Materi dakwah berasal dari Al Qur'an dan Sunnah. Para ahli dakwah biasanya mengklasifikasikan materi dakwah menjadi tiga bagian yaitu dakwah aqidah, fiqih dan akhlaq.

1. Aqidah

Abdul Majid Az Zandany mendefinisikan aqidah sebagai keyakinan yang tidak tercampur keraguan dalam jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah (Az Zandany, 1995:19). Aqidah atau iman dalam Islam dikenal melalui 6 pilar yaitu iman pada Allah, Rasulullah SAW, Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, Hari Kiamat dan Qadha-Qadar.

2. Fiqih

Fiqih dari segi bahasa berarti mengerti atau faham. Secara terminologi, fiqih menurut Ibnu Qudamah adalah pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat parsial dan dari dalil-dalil terperinci melalui penelitian terhadap dalil (Dahlan, 2011 :5).

Fiqih *ijtihadi* adalah seperangkat ketentuan hukum sara' yang didapat melalui usaha penelitian oleh mujtahid untuk memahami *al*

nushush syara' berasal dari Allah melalui hukum fiqih *ijtihadi* tidak bersifat mutlak benar dan pasti, melainkan bersifat kuat dugaan (*zhanni: relative*). Hal ini mengingat bahwa dalam penetapan hukum-hukum tersebut melalui kegiatan ijtihad, sedangkan manusia memiliki berbagai keterbatasan untuk menemukan kebenaran yang pasti (Dahlan, 2011:6-7).

3. Akhlaq

Akhlaq dari segi bahasa adalah jamak dari *khuluk* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku/tabiat (Abdullah, 2007:2).

Menurut Hamzah Yaqub, akhlaq adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang kata atau perbuatan manusia lahir dan batin (Abdullah, 2007:12).

Menurut Al Farabi seperti yang dikutip oleh Munir dan Wahyu Ilahi, ilmu akhlaq adalah bahasan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang tertinggi yaitu kebahagiaan, dan tentang berbagai kekurangan yang dapat mengurangi pencapaian tujuan tersebut (Munir dan Wahyu Ilahi, 2006 : 29).

Akhlaq yang baik tercipta dari pemahaman pada rukun iman dan rukun Islam. Teladan akhlaq yang baik terdapat pada diri Rasulullah SAW sebagaimana tercantum dalam Al Quran surat Al Ahzab:21 berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Depag RI, 2005: 421)

2.6. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin salah. Hipotesis akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya dan akan ditolak jika salah. Jawaban sementara ini diuji secara empiris di lapangan.

Berdasarkan kerangka teoritik di atas, hipotesis yang peneliti ajukan adalah hipotesis asosiatif (H_a) yaitu ada hubungan antara isi majalah Ar Risalah dengan materi yang dianggap penting oleh pembacanya di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.